

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana sistem pemerintahan seperti ini telah ditetapkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang “ (Grasindo, 2017). Sedangkan menurut Titik Triwulan Tutik memberikan pendapat bahwa demokrasi merupakan keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat .(Tutik & Indonesia., 2010)

Dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang adil, bijaksana dan berdasarkan mufakat sesuai dengan cermin Pancasila sila keempat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Yang berarti seluruh warga indonesia dapat ikut berperan di dalam sistem pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Peran warga Negara Indonesia dalam melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi menurut M.R Khairul Muluk dalam bukunya Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa partisipasi warga Negara terbagi menjadi empat proses. Yakni proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pengambilan keputusan (Muluk, 2006).

Pertama, dalam Proses perencanaan warga Negara berhak untuk memberikan usulan dan saran kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warga negaranya. Kedua, dalam proses pelaksanaan warga Negara berhak untuk mengawal berjalannya kebijakan yang telah disepakati bersama. Ketiga, dalam proses evaluasi setiap warga Negara berhak untuk mengkritik atau memberi saran terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan, kritik atau usulan ini haruslah bersifat membangun dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan yang keempat, dalam proses penerimaan manfaat pengambilan keputusan warga Negara berhak untuk memanfaatkan dan memelihara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya dan disertai dengan sikap tanggung jawab.

Dalam melaksanakan keempat proses tersebut setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk ikut andil di dalamnya. Melalui kritik atau usulan, warga negara diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka kepada pemerintah guna sebagai masukan pemerintah untuk menentukan kebijakan. Kritik atau usulan ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, contohnya dengan menggunakan cara konvensional seperti demonstrasi, surat terbuka yang ditujukan kepada pemerintah, maupun karya tulisan yang dimuat di media massa sebagai bentuk kritik dan saran. Meskipun cara yang lebih modern seperti melalui hastag (#) di media sosial, melalui karya seni fotografi, meme maupun gambar baik lukisan maupun seni jalanan atau mural.

Cara demonstrasi merupakan cara yang sering digunakan oleh warga Negara Indonesia dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan. Unjuk rasa atau demonstrasi menurut Undang-undang No. 9 tahun 1998 pasal satu ayat tiga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum (BPHN, 1998). Tentunya kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi ini diharapkan dilakukan dengan memberikan kritikan yang membangun dengan mempertimbangkan aspek etika, didasari oleh sebuah fakta maupun data yang benar-benar terjadi, serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Gambar 1. 1 Data Jumlah Kegiatan Demonstrasi

Hari	Tanggal	Jenis K...	Waktu ...	Waktu S...	Tempat	SKPD/In...	Aspirasi	Organis...	Penang...	Jumlah ..
Rabu	16 Okto...	Aksi Unj...	09.45	13.3	Kampus ...	Rektor d...	Menuntu...	Mahasis...	Sdr. Ade...	200
Rabu	16 Okto...	Monitoring	10.30	11.15	RT. 05 R...	DENSU...	Kegiatan...	DENSU...	Sdr. AKB...	30
Rabu	16 Okto...	Monitoring	08.00	23.15	Hotel As...	API Jab...	Kegiatan...	Aliansi P...	Sdr. Ust...	184
Kamis	17 Okto...	Aksi Unj...	10.30	10.45	Kampus ...	Rektor d...	Menuntu...	Mahasis...	Sdr. Ade...	500
Kamis	17 Okto...	Aksi Unj...	15.50	16.50	Kantor P...	Pemprov...	Dalam r...	Gerakan...	Sdr. Yus...	150
Kamis	17 Okto...	Aksi Unj...	15.50	17.05	Gedung ...	Pemprov...	Unjuk ra...	Masa Ak...	Sdri. Cla...	100
Jum'at	18 Okto...	Aksi Unj...	15.00	17.00	Gedung ...	Aliansi ...	Aksi Da...	Aliansi ...	Sdr. Iqba...	150
Rabu	23 Okto...	Aksi Unj...	09.53	10.20	Kantor D...	Kantor D...	Menyika...	DPP LS...	Sdr. Roh...	10
Kamis	24 Okto...	Monitoring	10.30	12.10	R. Tenga...	Pemerint...	Pembah...	Pemerint...	Bpk. Wal...	50
Jum'at	25 Okto...	Aksi Unj...	15.30	16.50	Traffic Li...	Gabung...	Menduk...	Gabung...	Sdr. M. T...	50
Minggu	27 Okto...	Monitoring	17.10	19.00	Rumah ...	Aliansi J...	Dalam r...	Aliansi J...	Sdr. Djar...	30
Senin	28 Okto...	Aksi Unj...	13/40	15.13	Kantor B...	Aliansi B...	Aspirasi ...	Aliansi B...	Sdr. Kos...	30
Senin	28 Okto...	Aksi Unj...	14.35	17.38	Kantor D...	Kelompo...	Aspirasi ...	Kelompo...	Sdri. Det...	50

Sumber : Website data.bandung.go.id tahun 2019

Data di atas merupakan data dari Pemerintahan Kota Bandung yang diunggah di awal tahun 2020 (Data Bandung, 2020). Dari data tersebut dapat kita lihat jumlah kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi dalam kurun waktu satu tahun mencapai jumlah 301 kegiatan yang tersebar di beberapa tempat serta dengan latar belakang yang berbeda. Angka ini menunjukkan kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu cara konvensional yang masih sering digunakan oleh warga Negara Indonesia dalam menyampaikan kritik atau usulan. Meski tingkat efektivitas dari kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi masih diragukan, namun kegiatan semacam ini masih diyakini kebanyakan warga

Negara Indonesia sebagai cara utama untuk menyampaikan kritik dan aspirasi mereka.

Namun, pada awal tahun 2020 pandemi virus SARS-Cov-2 melanda Indonesia hingga menimbulkan pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Pandemi corona virus menimbulkan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat secara luas. Segala jenis kegiatan dibatasi dan dikurangi melalui kebijakan PSBB (Pembatasan sosial bersekala besar) hingga kebijakan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Yang pada intinya berisi pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat secara luas. Segala faktor kegiatan dibatasi mulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan pemerintahan, kegiatan perekonomian, dan lain-lain. Tidak terkecuali kegiatan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan usulan melalui kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi juga harus dibatasi.

Kegiatan yang melibatkan banyak massa dilarang untuk sementara, sehingga kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi tidak diizinkan saat pandemi terjadi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan masyarakat beralih menggunakan media lain untuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Misalnya, melalui hastag (#) di media sosial, melalui karya seni fotografi, meme maupun gambar baik lukisan maupun seni jalanan atau mural, dan salah satu media menyampaikan kritik yang populer saat pertengahan tahun 2021 adalah media mural.

Mural menurut Susanto, memberikan definisi sebagai lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur (Susanto, 2002). Mural ini biasa ditemukan di tempat atau fasilitas umum khususnya di tembok-tembok yang tersebar di seluruh kota. Mural bisa berupa gambar kartun, karikatur, hewan,

manusia maupun seorang Tokoh yang lebih spesifik. Mural biasanya dibuat menggunakan cat yang dilukiskan pada media tembok-tembok yang berada di fasilitas umum sehingga gambar dapat dilihat secara jelas oleh masyarakat secara luas. Mural juga biasanya dilukiskan pada media yang bersifat permanen seperti tembok pagar, jalan layang hingga di bawah penyangga jalan Tol.

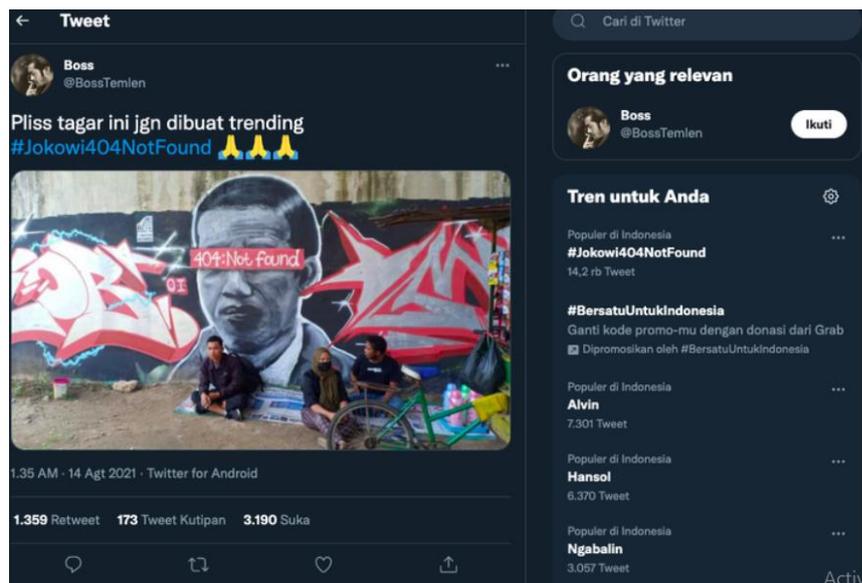
Mural berbeda dengan graffiti. Meski keduanya memiliki persamaan dalam media membuatnya. Graffiti lebih menekankan pada isi tulisan dan biasanya menggunakan cat spray untuk pengaplikasiannya. Sedangkan mural lebih menekankan pada makna gambar yang terkandung di dalamnya ditujukan kepada perorangan, kelompok, massa maupun masyarakat secara luas. Pesan-pesan yang disampaikan bisa berupa pujian terhadap pencapaian perorangan, kelompok, massa maupun masyarakat secara luas atau juga bisa berupa kritik terhadap perorangan maupun kelompok. Baik kritik, sosial, agama, maupun terhadap isu yang sedang terjadi.

Pesan yang terkandung dalam gambar sebuah mural seringkali bersifat tersirat dari seorang seniman mural. Pesan yang bersifat seperti ini tidaklah dapat dipahami oleh setiap orang yang melihatnya. Ketidakjelasan akan pesan yang ingin disampaikan oleh seniman mural akan menimbulkan prespektif dan pandangan yang berbeda dari setiap orang yang melihat mural. Perlu adanya cara atau metode dalam mengartikan pesan yang terkandung dalam sebuah karya mural. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode semiotika.

Semiotika berasal dari kata *Semion* yang berarti tanda, Tanda sendiri merupakan konvensi sosial (kesepakatan) yang dapat mewakili sesuatu yang lain. Sedangkan semiotika sendiri dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh

kebudayaan sebagai tanda (Wibowo, 2013). Tanda sendiri dapat berbentuk kata, gambar, suara, gerak tubuh dan objek. Melalui ilmu semiotika ini kita dapat mempelajari bagaimana makna dibuat dan bagaimana realitas direpresentasikan dari sebuah tanda yang ada. Ilmu semiotika lebih mudah dipahami sebagai ilmu yang mengaji sistem tanda dimana teori-teori dari ilmu ini mengacu kepada dua Tokoh yakni teori semiotika Ferdinand De Saussure dan Semiotika Charles Snaders Peirce, yang dikenal sebagai bapak semiotika modern. Tak terkecuali dalam mengaji tanda-tanda yang terdapat pada mural sebagai media kritik dan penyampaian pendapat yang cukup populer di pertengahan tahun 2021 lalu.

Gambar 1. 2 Cuitan Karya Mural Jokowi 404 Not Found



Sumber : Kicauan Twitter @BossTemlen 14 Agustus 2021

Salah satu unggahan Twitter @BossTemlen pada tanggal 14 Agustus 2021 saat itu menjadi trending perbincangan di media sosial Twitter. Unggahan dengan hastag "Jokowi404NotFound" menampilkan sebuah karya mural yang bergambarkan mirip seorang tokoh pemimpin di masa pemerintahan saat ini. mural dengan media tembok berlatar warna hitam merah tersebut mengirimkan pesan yang masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. banyak asumsi-

asumsi yang beredar di tengah masyarakat tanpa adanya bukti yang menjelaskan makna sebenarnya yang terkandung di dalam karya mural tersebut. Hingga saat ini keberadaan mural tersebut telah dihilangkan dengan menutup karya mural menggunakan cat tembok, namun meski mural telah dihilangkan keberadaannya, masyarakat masih belum mengetahui pesan apa yang terkandung dalam karya mural “Jokowi 404 Not Found” tersebut.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis mengambil judul penelitian Analisis Semiotika Cuitan Mural Mirip Presiden Joko Widodo 404 Not Found di Media Sosial Twitter @BossTemlen. Untuk mengetahui pesan yang terdapat pada mural yang diunggah pada 14 Agustus 2021 tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Semiotika Cuitan Mural Mirip Presiden Joko Widodo 404 Not Found di Media Sosial Twitter @BossTemlen.?

1.3. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara Semiotika Cuitan Mural Mirip Presiden Joko Widodo 404 Not Found di Media Sosial Twitter @BossTemlen.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang khususnya di

bidang ilmu komunikasi, terutama yang berkaitan dengan studi semiotika, baik dalam penelitian semiotika lambang maupun pada studi semiotika yang lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan baru kepada pembaca mengenai ilmu komunikasi khususnya studi semiotika yang dapat menggali sebuah makna dan pesan dari sebuah tanda maupun gambar. Serta penulis juga mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat membantu pembaca agar mengerti makna dan pesan dari cuitan mural “Jokowi 404 Not Found” tersebut sehingga terhindar dari kesalahan asumsi dan perilaku yang negatif.